



## **PENGADILAN AGAMA BIMA**



# **LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) SEMESTER 1 TAHUN 2021**

---



## PENGADILAN AGAMA BIMA

# LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Untuk Periode Januari – Juni 2021

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda  
Kota Bima - Nusa Tenggara Barat  
telp. 0374-6191134 Fax. 0374-45156  
e-mail : [info@pa-bima.go.id](mailto:info@pa-bima.go.id)  
[www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)



**LAPORAN  
HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA**

**Berdasarkan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 52 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas  
Menuju Wilayah Bebas Korupsi  
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Bima, 15 Juni 2021

Ketua Tim Survei,



Arifuddin Yanto, S.Ag.  
NIP. 19740715 199803 1 004



H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.  
NIP. 19731231.199803.1.008

## KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal kualitas bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam persepsi korupsi di Pengadilan Agama Bima, yang diambil melalui kuesioner.

Berdasarkan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan untuk ke depannya agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Bima dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Agama Bima.

Juni 2021

Tim Survei

## DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar dan Diagram .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Rencana Kerja .....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data .....	4
1.4.3 Pelaksanaan Survei.....	4
<b>BAB II METODOLOGI</b>	
2.1 Metode Penelitian.....	5
2.2 Populasi dan Sampel .....	5
2.3 Pengumpulan Data .....	6
2.4 Pengolahan Data.....	7
2.5 Teknik Analisis Data .....	7
2.6 Tahapan Pelaksanaan .....	9
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>	
3.1 Profil Responden .....	10
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden .....	10
3.1.2 Kelompok Usia Responden .....	11
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	12
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan .....	12
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	13
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh .....	14
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya.....	15
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan .....	16
3.2.6 Indikator Hadiah.....	17
3.2.7 Indikator Transparansi Biaya .....	18
3.2.8 Indikator Percaloan .....	19

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang .....	20
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia .....	21
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima.....	22

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	24
4.2 Rekomendasi .....	25

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

	Hal.
Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi Menuju Zona Integritas .....	9
Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden .....	11
Diagram 2. Diagram Umur Responden .....	12
Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan .....	13
Diagram 4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh .....	15
Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya.....	16
Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan .....	17
Diagram 8. Indikator Hadiah.....	18
Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya .....	19
Diagram 10. Indikator Percaloan .....	20
Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang .....	21
Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia .....	22
Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi .....	23

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan.....	4
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi .....	6
Tabel 3. Nilai Persepsi .....	8
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden .....	10
Tabel 5. Usia / Umur Responden.....	11
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	12
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	13
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	14
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	15
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	16
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah.....	17
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya.....	18
Tabel 13. Indeks Pada Indikator Percaloan .....	19
Tabel 14. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	20
Tabel 15. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia .....	21
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Agama Bima .....	22
Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Bima ..	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri (aparatur sipil negara), serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejalan dengan pelaksanaan **Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**, Pengadilan Agama Bima berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi

yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Bima adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik

## **1.4 Rencana Kerja**

### **1.4.1 Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

#### a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

#### b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner
- Bagian dari kuesioner/pengantar
- Kelengkapan peralatan

#### c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

#### d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### 1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan
- c. Pengujian kualitas dan validitas data
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilih berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden

#### 1.4.3 Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu enam bulan, sejak Januari 2021 hingga Juni 2021 dengan jumlah responden sebanyak 250 responden.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Persiapan Tim	05 Januari 2021 - 12 Januari 2021
2	Survei IPK	18 Januari 2021 – 11 Mei 2021
3	Pengolahan Data	17 – 31 Mei 2021
4	Penyusunan Laporan	02 - 11 Juni 2021
5	Publikasi	15 Juni 2021

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Agama Bima sejak Januari 2021 sampai 11 Mei 2021 dengan jumlah populasi sebanyak 710 orang, yang kemudian dipilih secara acak (*purpose sampling*). Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Dimana :

- S = jumlah sampel
- $\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk 1, taraf kesalahan 1%, 5%, 10%
- N = populasi
- P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Dari jumlah sebanyak 710 orang, dengan menggunakan perhitungan di atas didapatkan jumlah responden sebanyak 250 responden.

### 2.3 Pengumpulan Data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode questioner mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bima.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan 10 unsur atau indikator, adapun 10 unsur atau indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survey ini meliputi :

Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

## 2.4 Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi dihitung dengan menggunakan “*nilai rata-rata tertimbang*” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey terhadap sepuluh unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{JUMLAH BOBOT}}{\text{JUMLAH UNSUR}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{TOTAL UNSUR YANG TERISI}} \times \text{NILAI PENIMBANG}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

### **IPK Unit Pelayanan x 25**

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap satu.

## 2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menentukan *indesks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Pertama* : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

*Kedua* : Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**, seperti yang ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

## 2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1 Profil Responden**

**3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 51,60%. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :

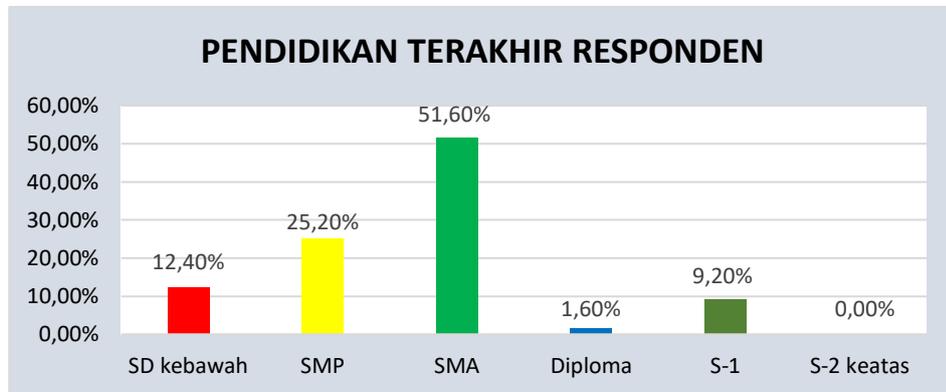
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	SD kebawah	31	12,40%
2	SLTP	63	25,20%
3	SLTA	129	51,60%
4	D1/D2/D3/D4	4	1,60%
5	S1	23	9,20%
6	S2 keatas	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>250</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei*

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden



### 3.1.2 Kelompok Usia Responden

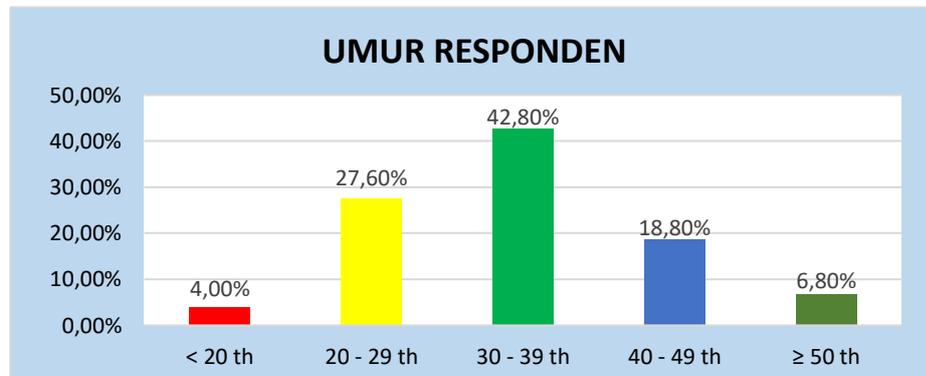
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berusia antara 30 tahun s/d 39 tahun dengan persentase 42.80%. Bagi kelompok usia di atas 51 - 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah > 60 tahun

Tabel 5. Usia / Umur Responden

NO	UMUR RESPONDEN	Frekuensi	Persentase
1	< 20 Thn	10	4,00%
2	20 - 29 Thn	69	27,60%
3	30 - 39 Thn	107	42,80%
4	40 - 49 Thn	47	18,80%
5	≥ 50 Thn	17	6,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Usia/Umur Responden di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 2. Diagram Umur Responden



### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

#### 3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima Bersih Dari Korupsi.

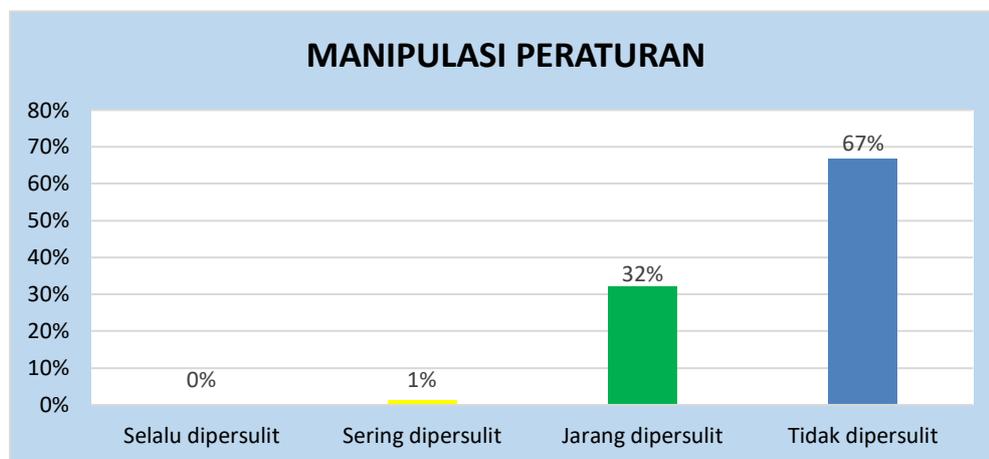
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu dipersulit	1	0	0%	0
2	Sering dipersulit	2	3	1%	6
3	Jarang dipersulit	3	80	32%	240
4	Tidak dipersulit	4	167	67%	668
<b>Total</b>			250	100,00%	914
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,66</b>

Sumber : Hasil pengolahan data

berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan



### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.64**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari Korupsi.

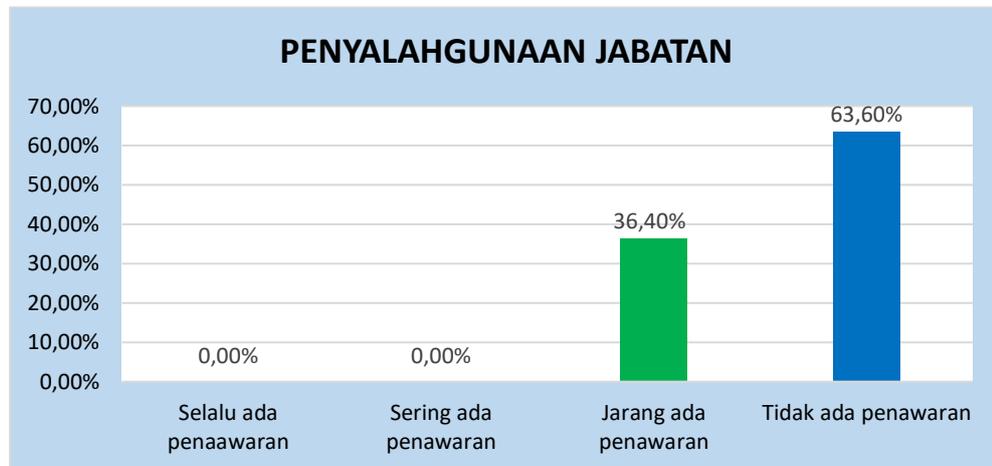
Tabel 7. Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Jabatan					
No.	Jawaban	Skor	Fre q	Prosentase	Tota l
1	Selalu ada penawaran	1	0	0,00%	0
2	Sering ada penawaran	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada penawaran	3	91	36,40%	273
4	Tidak ada penawaran	4	159	63,60%	636
<b>Total</b>			250	100,00%	909
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,64</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 4. Penyalahgunaan Jabatan



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3.64**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

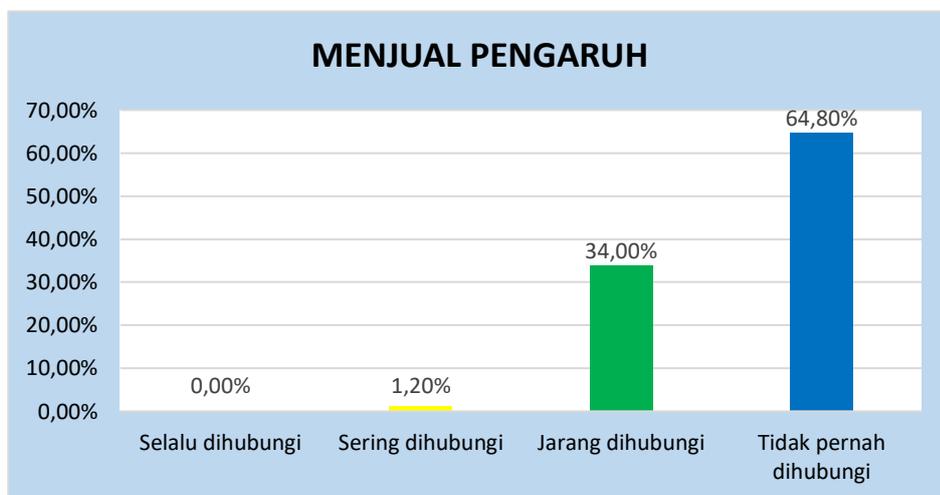
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh					
No	Jawaban	Skor	Fre q	Prosentase	Tota l
1	Selalu dihubungi	1	0	0,00%	0
2	Sering dihubungi	2	3	1,20%	6
3	Jarang dihubungi	3	85	34,00%	255
4	Tidak pernah dihubungi	4	162	64,80%	648
	<b>Total</b>		250	100,00%	909
	<b>NRR per Unsur</b>				<b>3,64</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh



### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

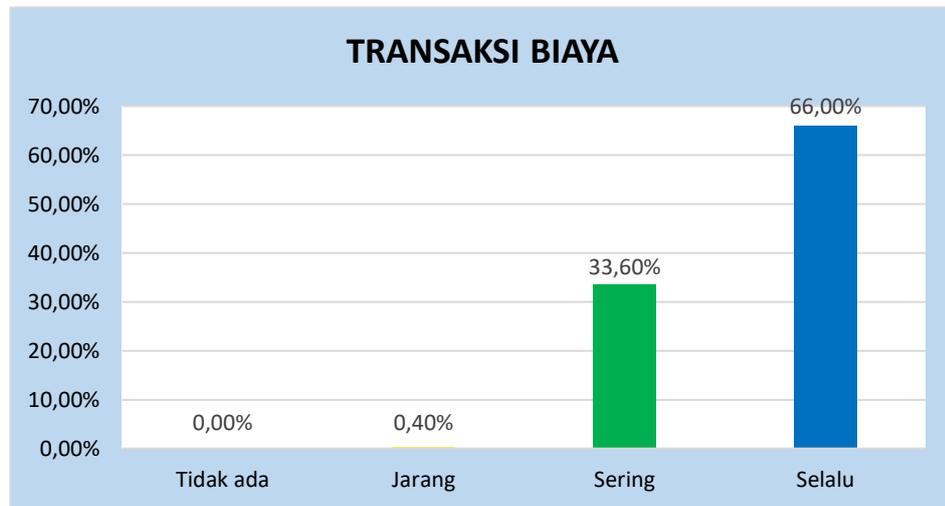
Tabel 9. Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Transaksi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak ada	1	0	0,00%	0
2	Jarang	2	1	0,40%	2
3	Sering	3	84	33,60%	252
4	Selalu	4	165	66,00%	660
	<b>Total</b>		250	100,00%	914
	<b>NRR per Unsur</b>				<b>3,66</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.72**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 10. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

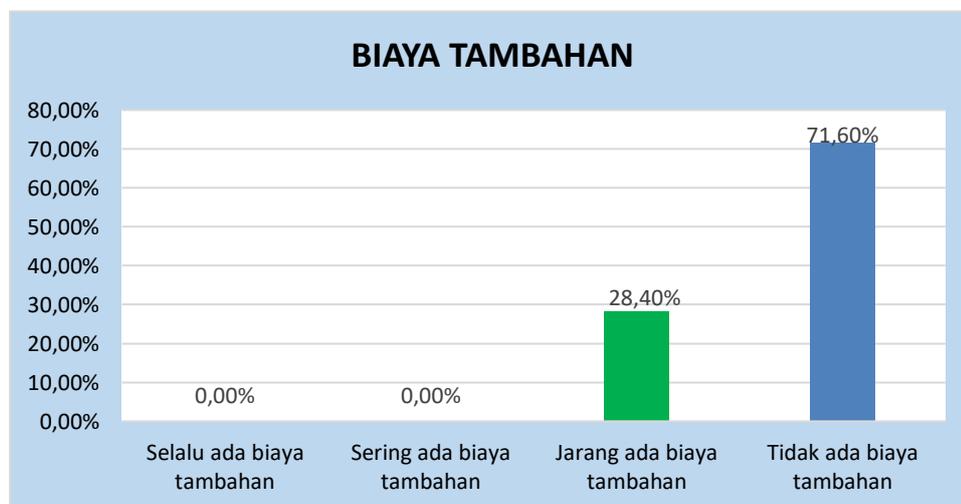
Biaya Tambahan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada biaya tambahan	1	0	0,00%	0
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada biaya tambahan	3	71	28,40%	213
4	Tidak ada biaya tambahan	4	179	71,60%	716
<b>Total</b>			250	100,00%	929
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,72</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) PA BIMA  
Periode Tahun 2021 Semester I

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan



### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3.55**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 11. Indeks pada Indikator Hadiah

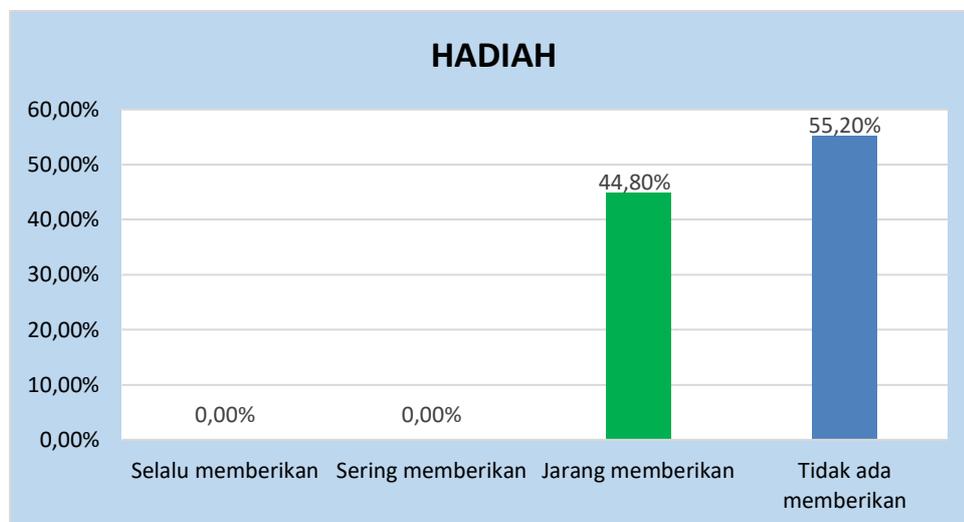
Hadiah					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu memberikan	1	0	0,00%	0
2	Sering memberikan	2	0	0,00%	0
3	Jarang memberikan	3	112	44,80%	336
4	Tidak ada memberikan	4	138	55,20%	552
<b>Total</b>			250	100,00%	888
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,55</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) PA BIMA  
Periode Tahun 2021 Semester I

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 8. Indikator Hadiah



### 3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.75**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

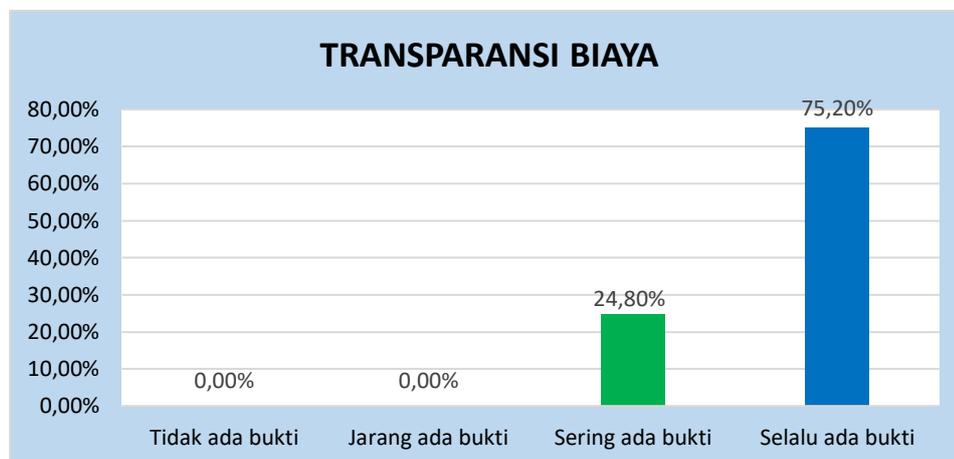
Tabel 12. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Tranparansi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak ada bukti	1	0	0,00%	0
2	Jarang ada bukti	2	0	0,00%	0
3	Sering ada bukti	3	62	24,80%	186
4	Selalu ada bukti	4	188	75,20%	752
<b>Total</b>			250	100,00%	938
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,75</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya



### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.63**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Percaloan

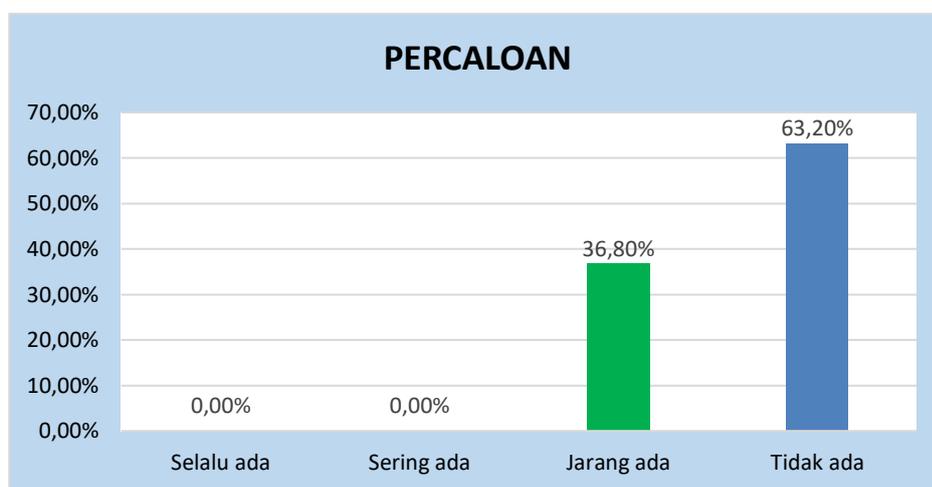
Percaloan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada	1	0	0,00%	0
2	Sering ada	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada	3	92	36,80%	276
4	Tidak ada	4	158	63,20%	632
<b>Total</b>			250	100,00%	908
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,63</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) PA BIMA  
Periode Tahun 2021 Semester I

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 10. Indikator Percaloan



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3.65**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

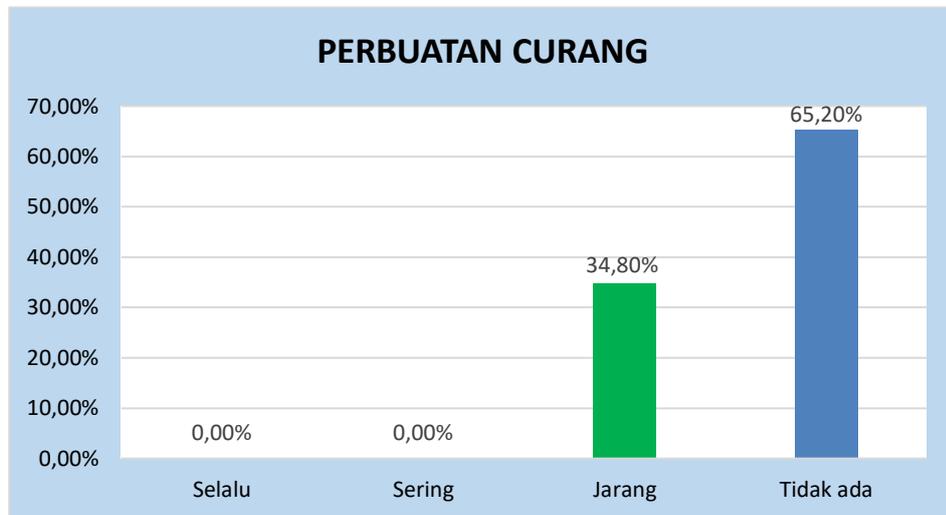
Tabel 14. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Perbuatan Curang					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	87	34,80%	261
4	Tidak ada	4	163	65,20%	652
<b>Total</b>			250	100,00%	913
<b>NRR per Unsur</b>					<b>3,65</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang



### 3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3.75**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

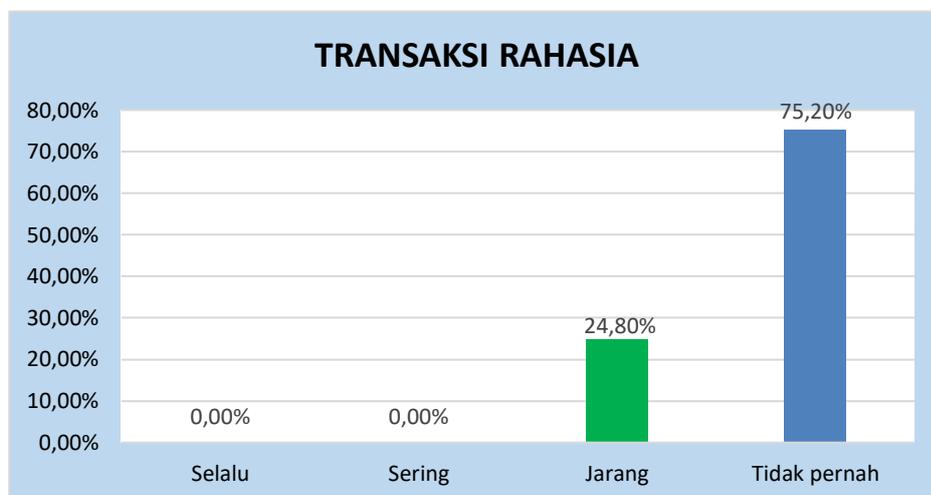
Tabel 15. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	62	24,80%	186
4	Tidak pernah	4	188	75,20%	752
<b>Total</b>			250	100,00%	938
<b>NRR per Unsur</b>					3,75

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia



### 3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima

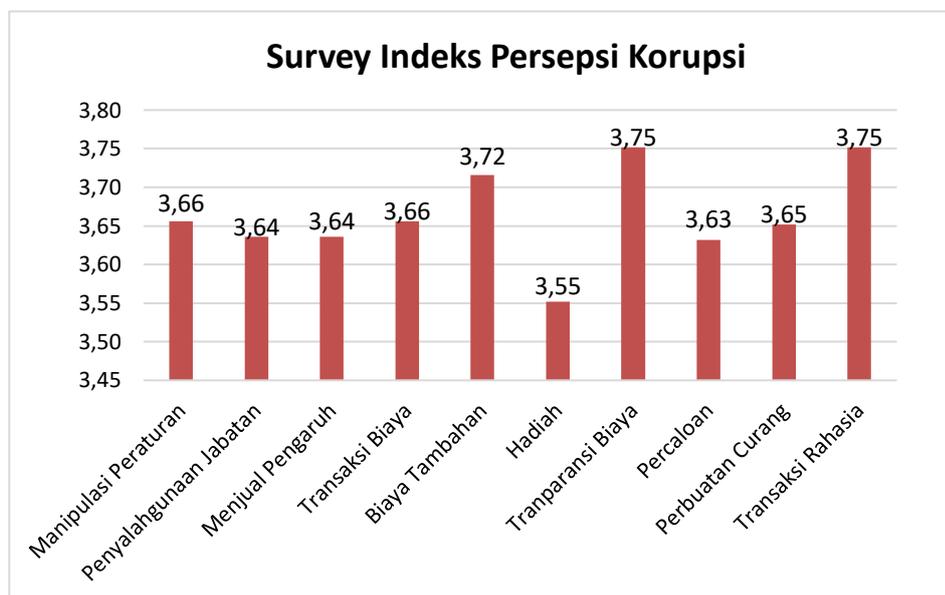
Dari 10 unsur dan/atau indikator persepsi korupsi, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima sebesar **3.66**.

Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Bima

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai IPK	Mutu	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,66	<b>3,66</b>	<b>4,00</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,64			
3	Menjual Pengaruh	3,64			
4	Transaksi Biaya	3,66			
5	Biaya Tambahan	3,72			
6	Hadiah	3,55			
7	Tranparansi Biaya	3,75			
8	Percaloan	3,63			
9	Perbuatan Curang	3,65			
10	Transaksi Rahasia	3,75			

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi



Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor **3.66** indeks tersebut, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00.

Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Bima memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.66** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, dengan indeks 3.66
  2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, dengan indeks 3.64
  3. Indikator Menjual Pengaruh, dengan indeks 3.64
  4. Indikator Transaksi Biaya, dengan indeks 3.66
  5. Indikator Biaya Tambahan, dengan indeks 3.72
  6. Indikator Hadiah, dengan indeks 3.55
  7. Indikator Transparansi Biaya, dengan indeks 3.75
  8. Indikator Percaloan, dengan indeks 3.63
  9. Indikator Perbuatan Curang, dengan indeks 3.65
  10. Indikator Transaksi Rahasia, dengan indeks 3.75.
2. Berdasarkan hasil survei IPK dari 10 (sepuluh) indikator terhadap 250 responden diperoleh nilai sebesar 3.66.
  3. Kategori / ruang lingkup dengan indeks tertinggi adalah persepsi Transparansi Biaya, dan Transaksi Rahasia yaitu sama sebesar 3.75, dan indeks yang terendah dengan perolehan nilai persepsi 3.55 yaitu unsur Hadiah.

## 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil survei IKP semester 1 periode bulan Januari sampai Juni tahun 2021 maka diperoleh beberapa rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan dalam pelayanan publik, yaitu :

- a. Harap meningkatkan mutu / kualitas pelayanan.
- b. Sosialisasi Tindakan gratifikasi bagi Aparatur Pengadilan Agama Bima
- c. Tindak tegas Hakim, atau aparat peradilan yang berbuat KKN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUESIONER SURVEI INDEKS PEPRSEPSI KORUPSI

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2021

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : Fendah.....(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : 32.....
4. Jenis Kelamin : 1. Laki - laki   Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)  
 SD 6. Sarjana (S1)  
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)  
 4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan  
 2. TNI/Polri 6. Pedagang  
 3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa  
 4. Wiraswasta  Lainnya... UET.....

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Eksternal</b>					
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b>	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b>	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? <b>(Menjual Pengaruh)</b>	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? <b>(Transaksi Biaya)</b>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	

5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? <b>(Biaya Tambahan)</b>	1	2	3	X	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? <b>(Hadiah)</b>	1	2	3	X	
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? <b>(Transparansi Biaya)</b>	1	X	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? <b>(Percaloon)</b>	1	2	X	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? <b>(Perbuatan Curang)</b>	1	2	X	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? <b>(Transaksi Rahasia)</b>	1	2	3	X	

**PETUGAS PELAKSANA :**

**1. Petugas :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

**2. Pencacah/Penghitung hasil survei :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

**3. Pengawas/Pemeriksa :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

33

### KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2021

#### IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : Syukroni, Vinti, Ismail (boleh inisial atau tidak diisi)  
 2. Instansi/Perusahaan :  
 3. Umur (Tahun) : 36 tahun  
 4. Jenis Kelamin : 1. Laki - laki  Perempuan   
 5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)  
 2. SD 6. Sarjana (S1)  
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)  
 SLTA  
 5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan  
 2. TNI/Polri 6. Pedagang  
 3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa  
 4. Wiraswasta  Lainnya... u8r.....

#### KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Eksternal</b>					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? <b>(Manipulasi Peraturan)</b>				
	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? <b>(Penyalahgunaan Jabatan)</b>				
	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? <b>(Menjual Pengaruh)</b>				
	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? <b>(Transaksi Biaya)</b>				
	1	2	3	4	

5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? <b>(Biaya Tambahan)</b>	1	2	3	4	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? <b>(Hadiah)</b>	1	2	3	4	
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? <b>(Transparasi Biaya)</b>	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek perseloran dalam pengurusan layanan di pengadilan? <b>(Perseloran)</b>	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? <b>(Perbuatan Curang)</b>	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar perselangan? <b>(Transaksi Rahasia)</b>	1	2	3	4	

**PETUGAS PELAKSANA :**

**1. Petugas :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

**2. Pencacah/Penghitung hasil survei :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

**3. Pengawas/Pemeriksa :**

- > Nama : .....
- > Tanda Tangan : .....
- > Tanggal Pelaksana : .....

## PENGHITUNGAN DATA IKP

### KUISIONER IKP

#### DATA PENCACAH

Nama :  
NIP :

#### DATA UNIT PELAYANAN

Unit Pelayanan : Pengadilan Agama Bima  
Jenis Pelayanan : Pengadilan

#### DATA MASYARAKAT

Umur	Ket	Jumlah	Persen
1. < 20 Thn		10	4,00%
2. 20 - 29 Thn		69	27,60%
3. 30 - 39 Thn		107	42,80%
4. 40 - 49 Thn		47	18,80%
5. ≥ 50 Thn		17	6,80%
<b>TOTAL</b>		<b>250</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Kelamin	Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki		90	36,00%
2. Perempuan		160	64,00%
<b>TOTAL</b>		<b>250</b>	<b>100,00%</b>

Pendidikan Terakhir	Ket	Jumlah	Persen
SD kebawah		31	12,40%
SLTP		219	87,60%

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
1	34	3	1	3	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	
2	40	4	2	1	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
3	36	3	1	2	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
4	25	2	1	1	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
5	38	3	2	1	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
6	56	5	2	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	
7	27	2	2	1	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
8	25	2	2	2	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	
9	21	2	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
10	20	2	1	2	5	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
11	18	1	1	2	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
12	27	2	1	3	5	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
13	33	3	2	2	5	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	
14	39	3	2	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	
15	34	3	1	3	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
16	34	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
17	20	2	2	1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
18	35	3	1	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
19	24	2	1	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	
20	25	2	1	3	5	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
21	38	3	1	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	22	2	2	3	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	
23	29	2	1	1	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	21	2	1	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
239	20	2	1	2	5	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	
240	18	1	1	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
241	27	2	1	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
242	31	3	2	3	5	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
243	32	3	2	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
244	59	5	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
245	35	3	2	3	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	
246	20	2	2	3	2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	
247	38	3	2	2	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
248	35	3	2	2	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
249	31	3	2	3	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	
250	37	3	2	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	
TOTAL						914	909	909	914	924	888	938	908	913	930	
Jumlah Kuisioner						250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Rata-Rata						3,66	3,64	3,64	3,66	3,72	3,55	3,75	3,63	3,65	3,75	
Rata-Rata x bobot						0,37	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	
Nilai Rata-Rata Tertimbang						3,66										
BPK						51,60										
Kategori						A										
Sangat Baik																